

Iklm Demokrasi Sudah Tidak Sehat

Jiwa Mahathir Mohammad Masih di UMNO

JOGJA -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menyatakan, dirinya tidak akan mendirikan partai baru pasca keluar dari Perhimpunan Bangsa Melayu Bersatu atau UMNO belum lama ini.

Meski tak lagi menjadi bagian dari partai tersebut, Mahathir mengaku jiwanya masih untuk partai berkuasa tersebut.

"Meski saya keluar tapi jiwa saya masih di umno, saya tidak akan buat partai baru," ungkap Mahathir usai menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Studi



YVESTA PUTU AYU/HARIAN BERNAS

PAPARKAN--Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad (kanan) menyampaikan paparannya terkait konflik pemerintahan Malaysia di UMY, Kamis (17/3).

Jumat Pahing, 18 Maret 2016

7

Iklm Demokrasi

Sambungan dari hal 1

Perdamaian dan Islam dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di kampus setempat, Kamis (17/3).

Menurut Mahathir, dia masih memperjuangkan semangat UMNO. Namun dia benar-benar tidak ingin lagi bergabung dengan partai tersebut karena Najib Razak.

UMNO dinilai Mahathir telah berubah menjadi partai pelindung Perdana Menteri Najib Razak. Padahal Najib saat ini disinyalir telah melanggar Undang-Undang karena korupsi.

"Tiap partai punya perjuangannya. Namun saat ini umno sudah jadi partai lain dan jadi partai pelindung Sri Najib (Najib Razak-red). Saya keluar dari partai itu karena sekarang jadi partai Sri Najib," tandasnya.

Mahathir merasa sistem demokrasi di Malaysia sudah lagi tidak jalan. Hal itu terbukti dari sulitnya anggota partai berkuasa tersebut maupun masyarakat luas untuk menyampaikan kritik pada Nazib.

Kondisi tersebut diakuinya berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengkritik pemimpinnya maupun partai yang berkuasa. "Sekarang ini tidak boleh ada anggota partai memberikan

teguran kepada presiden partai: Jika itu terjadi maka dia akan disingkirkan dari partai," tandasnya.

Hilangnya iklim demokrasi, lanjut Mahathir juga dibuktikan dengan adanya kasus dugaan korupsi di lembaga negara Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam kasus tersebut, disinyalir nama Najib ikut terlibat atas kesalahan manajemen lembaga keuangan negara 1MDB.

Najib juga memberhentikan wakil perdana menteri, Muhyiddin Yassin tahun lalu. Dia juga mengganti jaksa agung dan memindahkan pejabat yang ikut terlibat dalam penyelidikan 1MDB.

Bahkan Najib juga menutup dua surat kabar ternama dan menutup satu laman, Sarawak Report. Pembredelan itu dilakukannya karena mereka melaporkan dugaan korupsi di 1MDB.

Kasus tersebut tidak hanya berdampak pada pemerintahan. Namun pertumbuhan ekonomi Malaysia pun semakin melemah pada saat ini. Bila persoalan itu dibiarkan maka demokrasi akan sulit terwujud di Malaysia. "Untuk mengembalikan demokrasi di Malaysia itu kalau Najib tidak lagi jadi perdana menteri karena sudah melanggar undang-undang," imbuhnya.

(ptu)